



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA

Jl. Poros Benteng No. ...Telp. (0421) ...
P I N R A N G

KEPUTUSAN CAMAT PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 22 TAHUN 2021

SELAKU ATASAN PPID KECAMATAN PATAMPANUA

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN TAHUN 2021
KECAMATAN PATAMPANUA

CAMAT PATAMPANUA,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;
- b. bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Kecamatan Patampanua;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Patampanua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pinrang
Pada tanggal : 15 April 2021

CAMAT PATAMPANUA,



ANDI TAMBERO, S.STP., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19792012 199912 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT PATAMPANUA
 KABUPATEN PINRANG
 NOMOR
 TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
 DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
 NOMOR TAHUN 2021

Pada hari ini, Kamis tanggal Lima Belas bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	LHKPN PNS Kecamatan Patampanua	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / TTE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan

		dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut			
2.	Data RENSTRA, LKJIP, RENJA, RKA, DPA, LPPD, SIPD	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama masih digunakan
3.	Data sistem keamanan jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan	Selama masih digunakan
4.	Password dan Username Aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga Rahasia Pribadi	Selama masih digunakan
5.	Dokumen Pribadi ASN Diskominfo Sandi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Penyalahgunaan oleh pihak lain		Sampai ada persetujuan yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ANDI TAMBERO, S.STP., M.Si	Kepala Dinas	Kecamatan Patampanua	1.
2.	KIKI P. TOMPO, S.STP	Sekretaris	Kecamatan Patampanua	2.
3.	HERIANTO, SE	Kasi Pemerintahan	Kecamatan Patampanua	3.
4.	SUPARDI, S.Sos	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Patampanua	4.
5.	HASNIAH AKIB, SH	Kasi Kesejahteraan rakyat	Kecamatan Patampanua	5.
6.	Drs. H. MUHAMMAD ISMAIL MAPPE	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan Patampanua	6.
7.	IDRUS ALHABSYI, SE	Kasi Perekonomian	Kecamatan Patampanua	7.

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
CAMAT PATAMPANUA,



ANDI TAMBERO, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19792012 199912 1 001